



## Kapitalisasi Pendidikan dalam Perspektif Psikologi dan Islam

Received: 06<sup>th</sup> June 2020; Revised: 18<sup>th</sup> June 2020; Accepted: 24<sup>th</sup> September 2020

### Kartika Nur Umami\*)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,  
Surabaya

E-mail: [kartikanur242@gmail.com](mailto:kartikanur242@gmail.com)

### Abdul Muhid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,  
Surabaya

E-mail: [abdulmuhid@uinsby.ac.id](mailto:abdulmuhid@uinsby.ac.id)

\*) Corresponding Author

**Abstract:** The law states that education is the responsibility of the government as an effort to educate the nation's life. Capitalism which has penetrated in the field of Education changed the perspective of the community about the goals of education itself. Education, which is a means to develop the ability to think of humans, has been considered as a tool for profit. Educational capitalism has also given a partition to people who experience weak economic conditions in their education. Which for the weak economic community, it seems difficult to choose an educational institution that has sufficiently complete facilities. Conversely, for economically well off people, they can choose educational institutions with sufficiently complete facilities. This has become common knowledge for the public that in order to be able to pursue education up to the highest level it is necessary to have sufficient savings. In other words, it is necessary to have financial sufficiency to support education. This study aims to find out how educational capitalism is viewed from the perspective of psychology and Islam. By using the literature review method, the authors explore various references related to educational capitalism. The findings in this article show that the capitalization of education has reduced the goal of education that should be, namely the process of actualizing all the potential for self as God's creatures that is equipped by reason and potential. Enrich knowledge to be implemented as a form of servitude to God, not to foster knowledge as a means of accumulating wealth.

**Keywords:** Capitalization of Education, Goals of Education, Psychology and Islam.

**How to Cite:** Umami, K. N., & Muhid, Abdul. (2020). Kapitalisasi Pendidikan dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb*, Vol. 11, No. 2, (2020).

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan pada pasal 32 ayat (2) UUD 1945 (pasca perubahan) telah merumuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah

wajib membiayainya. Pasal (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Pemerintah memiliki tanggung

jawab dalam memfasilitasi setiap warga dalam mengenyam pendidikan.

Secara psikologis, pendidikan berupaya mengembangkan berbagai potensi manusia sehingga dia menjadi individu yang muslim, mu'min, muttaqin, dan sebilangan predikat lainnya yang pada gilirannya akan membentuk keluarga sakinah, yang berkontribusi bagi terciptanya *khairu ummah* (umat terbaik) (Syihabuddin, 2016). Pendidikan telah menjadi usaha manusia untuk mengembangkan akal pikiran sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat. Fasilitas yang telah disediakan perlu digunakan secara maksimal. Hal tersebut merupakan bagian dari mensyukuri apa yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Sebab manusia sejak lahir hanya membawa potensi yang lemah, tetapi dapat berkembang dan tumbuh menjadi kekuatan yang dahsyat. Ia berbeda dengan hewan, yang sejak lahir membawa potensi yang tinggi dan besar tetapi tidak tumbuh dan berkembang (Rahmi, 2016).

Setiap orangtua memiliki tanggung jawab yang sama, yakni memberi pengetahuan kepada anaknya. Disebutkan dalam Qs. Luqman ayat 12-14:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (١٢) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِنْقَالِ حَبَةً مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٦) يَا بُنَيَّ

أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧)

Artinya: 12. Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 13. Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar". 14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 16. (Lukman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. 17. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang

*demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).*

Kebanyakan masyarakat di Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, mereka meminta bantuan pihak lembaga pendidikan sebagai upaya memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Artinya, bidang pendidikan banyak dilirik oleh orangtua seperti halnya menanam investasi jangka panjang demi kehidupan masa depan anaknya. Mengutip pendapat dari Latif bahwa sekolah adalah pihak kedua yang terkait dalam urusan pendidikan, dan tidak kurang penting dari rumah maupun masyarakat (Sirait, 2017).

Seperti menjadi rahasia umum, bahwa semakin baik fasilitas pendidikan dalam sebuah lembaga maka semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini merugikan bagi keluarga yang kurang mampu, sebab mereka terbatas dalam memberi fasilitas pendidikan sebagaimana keluarga yang mampu. Secara tidak disadari, pemahaman seperti diatas telah memberi pengalaman berpikir tersendiri bagi pribadi masing-masing. Bahwa semakin kaya kehidupan sebuah keluarga, semakin terjamin pula pendidikan yang diperolehnya.

Disisi lain, dalam rangka mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kapitalisme menciptakan sebuah kondisi merkantisme pengetahuan, yaitu pengetahuan sebagai komoditas untuk menghimpun kapital dan keuntungan (Wahono, 2001). Sebagaimana banyak orang berjuang untuk mengumpulkan kapital, maka demikian pula orang berjuang untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan sebagai kapital. Dan kapital itu merupakan sumber dari kekuasaan. Tidak mengherankan apabila pemerintah mempunyai kepentingan untuk menguasai pendidikan dan khususnya kurikulum. Melalui kurikulum inilah terjadi proses indoktrinasi, yaitu proses untuk memanjangkan usia struktur kekuasaan yang ada. Menguasai pendidikan berarti menguasai kurikulum

(Tilaar, 2003). Dengan kata lain, Kapitalisme telah terlibat dalam mengkonstruksi pengetahuan sebagai alat untuk mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang disusun rapi dan terstruktur. Agar kepentingan pemilik modal terpenuhi.

Kapitalisme yang masuk ke dalam bidang pendidikan, identik mendahulukan keuntungan dan materi. Jiwa kapitalis berbasis pendidikan telah menjadi pemandangan keseharian dalam dunia pendidikan (Solihin, 2015). Selain itu, dengan alasan peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan fasilitas serta tuntutan persaingan global, secara sepihak menaikkan biaya pendidikan (Ulum, 2018).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji kapitalisme pendidikan yang menjadi isu dalam dunia pendidikan dengan menggunakan perspektif psikologi dan islam. Pembahasan dalam tulisan ini berusaha untuk mengurai kapitalisme yang tengah masuk dalam bidang pendidikan dengan perspektif psikologi dan islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*literatur review*). Oleh karena itu, yang dilakukan adalah eksplorasi terhadap berbagai referensi yang terkait dengan kapitalisme pendidikan. Kemudian peneliti memilah dan menelaah secara mendalam beberapa data hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian selanjutnya dianalisis dalam perspektif psikologi dan Islam.

## **KAPITALISME DALAM PENDIDIKAN**

Amanat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 telah menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan yang disebutkan diatas, menjadi kesadaran bagi pengelola lembaga pendidikan untuk mengatur kurikulum pendidikan sebagai upaya menyiapkan manusia yang berpengetahuan luas dan bijak.

Tujuan dari proses pendidikan adalah adanya proses perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah perkembangan secara alamiah menuju kedewasaan. Makna dari kedewasaan dalam hal ini adalah kematangan yang bersifat biologis, jasmaniah, atau fikir, rasa, dan karsa. Bahkan secara moral, dalam arti bertanggung jawab, sadar, dan normative (Pasaribu, 2017). Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka adalah ayahnya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. Karena itulah semua ulama berpendapat bahwa mendapatkan dalil dan ilmu guna menguatkan iman hukumnya *fardhu ‘ain* bagi setiap muslim (Az-Zandani, 2016). Dapat dipahami bahwa perubahan yang terjadi dalam proses berfikir, bertindak, dan beragama pada diri manusia adalah wujud dari proses pendidikan yang diperolehnya. Kemudian, pendapat Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Nurcholis Majid telah membagi fitrah manusia menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Fitrah al-Ghazirat, merupakan potensi dalam diri manusia yang dibawanya sejak lahir. Bentuk fitrah (potensi) ini antara lain adalah nafsu, akal, dan hati nurani.

b. Fitrah al-Munazzalat, merupakan potensi yang bersumber dari luar diri manusia. Wujud fitrah ini adalah wahyu Ilahi yang diturunkan Allah untuk membimbing dan mengarahkan potensi yang ada pada diri manusia untuk berkembang sesuai dengan fitrah-Nya yang hanif. Semakin tinggi hubungan antara kedua fitrah manusia itu maka akan semakin tinggi pula kualitas manusia (insan kamil), akan tetapi bila kedua fitrah itu hubungannya tidak serasi atau berbenturan maka manusia akan semakin tergelincir dari fitrahnya yang hanif (Hafid et al., 2018).

Dalam menempuh pendidikan, setiap dari peserta didik tentu akan dihadapkan dengan biaya administrasi pendidikan. Antara peserta didik dan lembaga pendidikan kerap kali dibenturkan dengan hal tersebut. Mengutip pendapat Mukhamad Faris bahwa akibat dari kapitalisasi pendidikan, kampus semakin jauh dijangkau oleh orang miskin, termasuk sekarang yang terjadi di Unesa yang juga secara otomatis memakai logika bisnis, bukan logika pendidikan (Taufik & Affandi, 2014). Pendidikan terlalu banyak dipengaruhi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari kelas atau kelompok masyarakat yang berkuasa, yaitu kelompok kapitalis (Tilaar, 2003). Pendidikan yang menjadi jembatan manusia menuju pengetahuan yang lebih komprehensif, dibatasi dengan tarif biaya administrasi yang membatasi akses pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap anak di Indonesia. Hal tersebut juga berdampak pada fasilitas pendidikan yang didapatkan. Pola kapitalisasi pendidikan di Indonesia memiliki akar dari *grand design* paham kapitalisme global. Jika dahulu ketika pemerintah kolonial belanda hanya memberikan kesempatan pada penduduk pribumi (*inlander*) untuk sekolah sampai SR, sementara itu golongan ningrat (*Borjuis*) saja yang mempunyai

kesempatan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (Bakar, 2012).

Potensi yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai bekal membangun kehidupan di bumi sudah sepatutnya dikembangkan secara maksimal. Mencari dan berusaha mencari ilmu melalui proses pendidikan adalah salah satu upaya menyiapkan diri mengemban tugas utama kekhalifahan manusia, yaitu tugas melaksanakan program mengembangkan kehidupan yang layak, yang berkenan pada Tuhan atau diridhai-Nya (Madjid, 2008). Sheilla Chairunnisyah Sirait mengutip pendapat dari Latif bahwa Pendidikan selalu bersinggungan dengan upaya pembinaan manusia, oleh sebab itu keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada unsur manusianya yang menjadi penentu akan berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan (Sirait, 2017). Upaya dalam mengembangkan potensi oleh manusia itu sendiri perlu ditopang dengan keinginan yang kuat dalam diri, agar terdapat motivasi dalam menempuh pendidikan.

Rupert C. Lodge berpendapat bahwa pendidikan dan kehidupan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pernyataannya yang sangat populer: *life is education, education is life*; hidup atau kehidupan adalah pendidikan, dan pendidikan adalah hidup atau kehidupan itu sendiri (Solihin, 2015). Menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh negara. Manusia yang otonom selalu memiliki sejarah seperti halnya keyakinan dan nilai-nilainya. Hal ini mungkin terjadi karena manusia dapat mengontrol gambaran yang dimiliki individu tentang dirinya sendiri. Kekuasaan untuk mengontrol dan menghukum, demikian pula praktik-praktik disipliner digunakan untuk menciptakan subjek-subjek manusia yang mengatur perilakunya (Tilaar, 2003). Manusia yang memiliki kekuasaan akan lebih mudah mengatur hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dengan tidak memiliki kekuasaan. Salah satunya

pendidikan. Penguasa dapat memiliki akses mengondisikan sistem pendidikan agar kebutuhan dan keinginan kelompok kapitalis terpenuhi.

Kapitalisasi pendidikan sangat berkaitan erat dengan perkembangan proses dialektika pendidikan di tingkat kampus. Komersialisasi pendidikan, liberalisasi pendidikan dan privatisasi pendidikan menjadi isu yang selalu hangat dibicarakan mahasiswa sebagai elemen yang langsung merasakan dampaknya. Biaya pendidikan kampus yang mengalami kenaikan, merupakan akibat langsung dari praktik komersialisasi pendidikan. Pragmatisme akhirnya terjadi dalam dunia pendidikan dan hal itulah yang salah satunya menstimulus terbentuknya pola kesadaran mahasiswa. Mahasiswa sebagai kelompok yang menjadi korban dari kapitalisasi pendidikan kemudian mempunyai sikap terhadap kondisi pendidikan yang telah tereduksi oleh kepentingan dari sistem kapitalis (Taufik & Affandi, 2014). Industrialisasi berkepentingan melipat gandakan produksi barang-barang kebutuhan hidup secara lebih praktis dan pragmatis. Selanjutnya, sistem perindustrian berpengaruh kuat terhadap munculnya sistem politik kekuasaan. Ketika kekuatan politik kekuasaan bersinergi dengan sifat perindustrian, sistem perekonomian kapitalistikpun mendapatkan keleluasaan (Idris, 2010). Pendidikan turut andil sebagai penyedia manusia berwawasan, juga cukup berkontribusi bagi kelompok kapitalis. Banyaknya peminat dalam bidang pendidikan ini menyuburkan kepentingan masyarakat yang memiliki kekuasaan.

Dalam konteks di Unesa terdapat kekuasaan positif yang berbentuk ancaman dan tekanan bagi mahasiswa yang terlibat aktifitas organisasi ekstra kampus. Secara umum bisa dikatakan bahwa birokrasi Unesa sebagai pemegang kekuasaan yang dipimpin oleh rektor sebagai pemegang kekuasaan adalah suatu kekuatan yang

dimiliki birokrasi atau seseorang rektor yang dengannya dia mampu mengatur, mengendalikan, bahkan memaksakan kebijakan kampus kepada mahasiswa (Taufik & Affandi, 2014). Artinya, kapitalisasi pendidikan telah mengatur sistem pendidikan sebagai komoditas produsen keuntungan bagi kelompok tertentu hingga mampu untuk menekan dalam hal ini adalah mahasiswa, menjadi objek kapitalisme.

Dari pengamatan secara menyeluruh mengenai proses pendidikan dalam arti luas, ternyata terdapat suatu kenyataan yang menggerakkan kebutuhan yang diminta oleh masyarakat guna peningkatan taraf hidupnya. Tidak jarang, kekuasaan menyusupi kegiatan-kegiatan pendidikan didalam berbagai bentuknya. Kekuasaan tersebut dapat berwujud objektif atau terang-terangan, dapat pula berwujud subjektif atau secara tidak disadari telah mengarahkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang dikenal sebagai "*hidden curriculum*" (Tilaar, 2003). Sebagai anak dari kapitalisme, merupakan tantangan yang harus dihadapi bahwa program studi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, laris manis seperti kacang goreng. Sementara program studi yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar mulai sepi peminat. Mengutip pendapat dari Agus Wibowo bahwa wajah pendidikan seringkali dihiasi oleh corak Mc. Donalikasi dan komersialisasi pendidikan. Istilah ini digunakan oleh H.A.R Tilaar untuk mencirikan corak pendidikan kita yang produk impor dan prosesnya serba instant (Lisnawati, 2016). Fenomena kurangnya peminat terhadap program studi ataupun jurusan sekolah telah memberi kesan bahwa prospek kedepan dengan memilih program studi ataupun jurusan sekolah tersebut tidak memiliki masa depan yang cerah. Keberhasilan seseorang dalam mencapai pendidikan tinggi, hanya dikaitkan dengan keberhasilan mereka memperoleh selebar ijazah yang nantinya dapat "dijual" untuk memperoleh pekerjaan yang "layak" menurut persepsi

mereka. Masyarakat pun sering membenarkan persepsi tersebut (Martono, 2010).

Dalam konteks pendidikan, Max Weber menyingkapkan bahwa basis dari gerak sejarah sistem pendidikan dunia ditentukan oleh kapital (ekonomi). Teori ini disebut dengan determinisme ekonomi (Nurdin et al., 2016). Kapitalisasi pendidikan di Indonesia mulai begitu terasa setelah disahkannya rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU) pada tanggal 2008. Cukup mengherankan memang, sebuah UU yang berpotensi menyusahkan masyarakat kelas bawah namun lolos begitu saja tanpa adanya penolakan yang berarti, kecuali sejumlah demonstrasi mahasiswa yang suaranya kurang lantang hingga hilang begitu saja (Zulkhairi, 2016). Darmaningtyas menyebutkan bahwa substansi dari RUU BHP ini adalah menekan tata kelola badan hukum pendidikan yang merupakan ciri dari suatu korporasi. Perlu diketahui bahwa misi utamanya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk dapat melakukan investasi yang lebih besar lagi. Dengan disahkannya RUU BHP menjadi Undang-Undang. Secara sistematis lembaga-lembaga pendidikan formal suatu korporasi telah terbentuk (Zulkhairi, 2016).

Sebagai lembaga pendidikan, kampus yang menjadi tempat dari perkembangan ilmu pengetahuan hanya akan menjadi ruang untuk mencari keuntungan bagi para pemodal. Kampus dijadikan ajang untuk mencari keuntungan, demikian pula kampus Unesa. Sehingga spirit pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa menjadi terkikis (Taufik & Affandi, 2014). Max Weber, dalam bukunya berjudul *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism* mendefinisikan kapitalisme sebagai hadirnya industri bagi kebutuhan kelompok manusia yang dilaksanakan dengan metode perusahaan yang dikelola secara rasional. Weber menggunakan semangat kapitalisme untuk

menggambarkan sikap mental yang selalu berusaha mencari keuntungan secara rasional dan sistematis (Samrin, 2015). Lembaga pendidikan yang berada dalam pusaran kapitalism, menyebabkan orientasi berpikir bahwa keuntungan pemodal dapat dicari dengan menyusun strategi yang tersistem. Hingga tujuan pendidikan telah terjerumus ke dalam orientasi bisnis.

### **PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN ISLAM TERHADAP KAPITALISASI DALAM PENDIDIKAN**

Hurlock mengatakan bahwa Psikologi bisa dikatakan sebagai cabang ilmu yang meneliti tentang perubahan inter dan intra individual pada diri manusia (Ghofur, 2018). Psikologi pendidikan bermaksud untuk menerapkan psikologi ke dalam proses untuk mengajar. Sedangkan arti psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia yang nantinya mempengaruhi proses mengajar dan belajar (Djiwandono, 2002). Psikologi Pendidikan Islam sendiri merupakan kajian keilmuan yang dapat dikatakan masih baru, Psikologi Pendidikan Islam merupakan bagian dari psikologi umum. Psikologi Pendidikan Islam ini terbentuk karena adanya kegelisahan akademik kaum muslim yang menyatakan bahwa kajian psikologi, khususnya psikologi pendidikan tidak ada sangkut pautnya dengan ranah al-Quran. Independensi mereka berdasarkan kajian-kajian keilmuan filsafat-positivistik. Padahal, sejatinya kajian psikologi itu sudah ada bibit-bibitnya di dalam al-Quran yang dicerna melalui ayat-ayatnya (Rahmatullah, 2013). Psikologi Pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai sebuah pengetahuan yang mengintegrasikan antara psikologi umum dengan pendidikan islam yang berlandaskan al-Quran dan Hadist sebagai pedoman berpikir.

Kapitalisasi Pendidikan tidak sesuai dengan nilai – nilai Islam. Islam

tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban seseorang berdasarkan harta atau suku bangsanya, namun berdasarkan taqwa (Zulkhairi, 2016). Dalam sebuah nadham yang terdapat pada kitab Alala disebutkan bahwa syarat mencari ilmu ada enam. Yakni: cerdas, semangat, sabar, modal, Pentunjuk guru, waktu yang lama. Kaitannya dengan kapitalisasi pendidikan adalah pada poin ke empat, yakni modal. Cukup relevan bahwa memang dalam menempuh pendidikan setiap peserta didik perlu memiliki modal sebagai kesungguhan dalam mencari ilmu.

Dalam wawancaranya dengan dosen psikologi kepribadian sekaligus menjadi guru diniyah (keagamaan). Diperoleh informasi jika makna modal pada poin keempat adalah belajar membutuhkan modal secara fisik (*human*) dan modal secara biaya (*financial*) (Wafa, 2017). Modal secara fisik dapat dipahami sebagai modal yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik adalah kemampuan secara fisik dalam kondisi sehat. Artinya, peserta didik perlu menjaga kesehatan kondisi tubuh agar memiliki modal secara fisik yang baik. Adapun untuk modal secara biaya adalah untuk memenuhi kebutuhan selama mencari ilmu sendiri itu cukup.

Pendidikan Islam merupakan kegiatan penyiapan diri manusia agar mampu memikul amanah Islam yang terdiri dari aneka keyakinan, ibadah, dan mu'amalah. Dengan demikian, sumber pendidikan Islam yang utama ialah Al-Quran dan Al-Hadits yang suci (Syihabuddin, 2016). Pendidikan bagi al-Ghazali adalah sesuatu yang sangat fundamental, karena dengan memahami hakikat pendidikan yang tepat maka manusia akan memaksimalkan potensi jiwanya di dalam mengetahui. Begitu sebaliknya, jika manusia tanpa dibarengi dengan pendidikan maka akan sama dengan mematikan jiwa yang dimilikinya (Ghofur, 2018). Dapat diketahui bahwa mengelola jiwa adalah dengan kemampuan

memahami pendidikan, hal tersebut merupakan usaha mengasah jiwa agar mampu memikul tanggungjawab sebagai seorang manusia.

Tujuan pendidikan lebih berkaitan dengan tugas-tugas untuk meneliti potensi-potensi yang ada dalam diri manusia dan membuat proyek yang membantu manusia supaya dapat merealisasikan potensi dirinya secara penuh (Koesoema, 2007). Tujuan pendidikan bisa selaras dengan tujuan keyakinan iman nilai-nilai agama tersebut. Tujuan pendidikan bisa sesuai dengan tujuan agama itu dalam menjawab awal dan akhir tujuan hidup manusia sebagai hakikat dan tujuan hidup manusia (Koesoema, 2007). Akibat perubahan pola pikir yang dipengaruhi oleh kapitalisme dan materialisme yang sangat radikal terhadap cara pandang masyarakat terhadap pendidikan saat ini. Cita-cita pendidikan untuk melahirkan pribadi yang memiliki kecerdasan emosional dan intelektual serta memiliki ketrampilan, tergerus sedemikian rendahnya (Nurdin et al., 2016). Karena dengan memperoleh pendidikan, manusia akan mengalami proses berpikir hingga mendapatkan kesadaran bahwa segala sesuatu yang tengah berada disekeliling kita saat ini merupakan tidak lepas dari kekuasaan Allah dan sebagai manusia yang dapat dilakukan adalah berusaha dengan keras agar akal dan potensi digunakan dengan maksimal.

Ketika dihadapkan dengan realitas kehidupan yang mendesak manusia untuk bekerja dengan memanfaatkan proses pendidikan yang telah dienyam selama sekian tahun. Bagi jiwa yang hidup, hal tersebut bukanlah kerisauan. Bekerja mempunyai dua dimensi yang berbeda menurut takaran seorang muslim, yaitu bahwa makna dan hakikat bekerja adalah

fitrah manusia yang secara niscaya sudah seharusnya demikian. Sehingga setiap pekerjaan yang diberikan makna atau niat dengan sungguh kelak pelakunya di hadapan Allah dalam keadaan mulia (Tasmara, 2002). Etos kerja dalam Islam terkait erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah tentang kerja yang dijadikan sumber inspirasi dan motivasi setiap muslim dalam melakukan aktivitas kerja di berbagai lini kehidupan (Irham, 2012). Dengan memiliki sudut pandang diatas, esensi tujuan pendidikan yang kerap kali disalah persepsikan dengan alat memperoleh pekerjaan agar mendapat keuntungan dikemudian hari akan tergeserkan dengan pemahaman bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan adalah untuk mencari RidhoNya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kapitalisasi Pendidikan telah mengubah wajah pendidikan hingga beberapa masyarakat memandang tujuan pendidikan adalah untuk memperkaya diri agar memiliki kehidupan yang terjamin. Hal tersebut tidak sesuai dengan hakikat pendidikan yang mengembangkan akal dan potensi manusia yang telah diberikan oleh Tuhan. Sudut pandang diatas layaknya dirubah dengan kehadiran Tuhan sebagai tujuan pendidikan yang mengorientasikan proses hidup sebagai bentuk penghambaan kepadaNya. perlu disadari kembali, pendidikan merupakan transportasi menuju *insan kamil*, agar orientasi pendidikan tetap berada pada jalurnya yakni perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Bukan dari yang miskin menjadi kaya ataupun kaya menjadi semakin kaya.

## DAFTAR PUSTAKA:

- Az-Zandani, S. A. M. (2016). *Ensiklopedi Iman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.*
- Bakar, M. Y. A. (2012). Pengaruh Paham Liberalisme dan Neoliberalisme Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *Tsaqafah*, 8(1), 135. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i1.22>
- Djiwandono, S. E. W. (2002). *Psikologi Pendidikan* (pp. 1–471). Grasindo.
- Ghofur, A. (2018). Tasawuf Al-Ghazali : Landasan Psikologi Pendidikan Islam. *Jurnal Islam Nusantara*, 02(01), 1–16. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i1.74>
- Hafid, H., La, A., & Zainuddin. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Deepublish.
- Idris, R. (2010). Apbn Pendidikan Dan Mahalnya Biaya Pendidikan. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 13(1), 92–110. <https://doi.org/10.24252/lp.2010v13n1a7>
- Irham, M. (2012). Etos Kerja Dalam Perspektif Islam. *Subtansia*, 14(9), 11–24. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Koesoema, A. D. (2007). *Pendidikan Karakter*. Grasindo.
- Lisnawati. (2016). Pendidikan Islam Dan Liberalisme. *Muta'aliyah*, 1(1), 52–72.
- Madjid, N. (2008). *Islam, Kemoderenan, dan Keindonesiaan*. Mizan.
- Martono, N. (2010). Kritik Sosial Terhadap Praktik Pendidikan Dalam Film “Laskar Pelangi.” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(3), 341–350. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i3.466>
- Nurdin, M., Muzakki, M. H., & Sutoyo, S. (2016). Relasi Guru Dan Murid (Pemikiran Ibnu ‘Athailah Dalam Tinjauan Kapitalisme Pendidikan). *Kodifikasia*, 9(1), 121–146. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v9i1.463>
- Pasaribu, A. (2017). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 12–34.
- Rahmatullah, A. S. (2013). Kecerdasan Interpersonal Dalam Al-Qur'an Dan Urgensinya Terhadap Bangunan Psikologi Pendidikan Islam. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v11i1.388>
- Rahmi, N. (2016). *MANUSIA DALAM PRESPEKTIF PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM Novita Rahmi \* II*, 206–214.
- Samrin. (2015). Kapitalisme dan Pendidikan Liberal-Kapitalistik. *Shautut Tarbiyah*, 33, 130–146.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata*, 2, 158–182.
- Solihin, M. (2015). (Analisis Dampaknya Terhadap Upaya Mencerdaskan Kehidupan

Bangsa). *Nur El-Islam*, 2(2), 56–73.

Syihabuddin. (2016). *Landasan Psikologis Pendidikan Islam*. UPI Press.

Tasmara, T. (2002). *Membudidayakan Etos Kerja Islami, Jakarta: Gema Insani*. Gema Insani.

Taufik, M., & Affandi, M. A. (2014). Resistensi Gerakan Mahasiswa Terhadap Kapitalisasi Pendidikan (Studi Organisasi Eksternal Kampus UNESA). *Paradigama*, 2(3), 1–13. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Tilaar, H. A. . (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan: suatu tinjauan dari perspektif studi kultural*. Indonesia Tera.

Ulum, M. (2018). EKSISTENSI PENDIDIKAN PESANTREN: KRITIK TERHADAP KAPITALISASI PENDIDIKAN. *Ta'lim*, 1(2), 240–257.

Wafa, I. A. (2017). *TEMA – TEMA PSIKOLOGI DALAM NADZOM ALALA KARYA SYEKH BURHANUDIN AL-ISLAM AL-ZARNUJI TEMA – TEMA PSIKOLOGI DALAM NADZOM ALALA KARYA SYEKH BURHANUDIN AL-ISLAM AL-ZARNUJI MELALUI METODE MAWDHU`I*. Skripsi - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Retrieved from <http://etheses.uin-malang.ac.id/10754/>

Wahono, F. (2001). *Kapitalisme Pendidikan antara Kompetisi dan Keadilan*. Insist Press.

Zulkhairi, T. (2016). KAPITALISASI PENDIDIKAN DAN PENGARUHNYA DI ACEH. *Kalam*, 4(2), 119–132.